

ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKUKAN
PEMBERESAN HARTA/BOEDEL PAILIT (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh**

Gama Wijaya

NIM. E 0013193

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKUKAN
PEMBERESAN HARTA/BOEDEL PAILIT (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Disusun oleh:

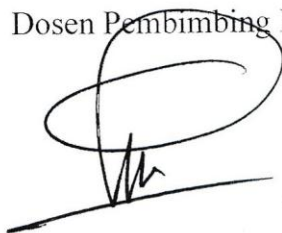
GAMA WIJAYA

NIM. E0013193

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 11 April 2017

Dosen Pembimbing I



Harjono S.H., M.H.

NIP.191101041986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PEMBERESAN
HARTA/BOEDEL PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769**

K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Oleh:

GAMA WIJAYA

NIM. E0013193

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

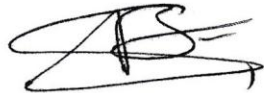
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/Tanggal : Rabu 19 April 2017

DEWAN PENGUJI

1. Syafrudin Yudowibowo S.H., M.H

NIP. 197511302005011001

()

2. Dr. Soehartono S.H., M.Hum

NIP. 195604251985031002



3. Harjono, S.H., M.H.

NIP. 19610104198011001

()

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001



PERNYATAAN

Nama : GAMA WIJAYA
NIM : E0013193

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul :
ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKUKAN
PEMBERESAN HARTA/BOEDEL PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016) adalah betul-betul karya sendiri.
Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda
citaisi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
penulisan hukum (Skripsi) ini

Surakarta, April 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Gama Wijaya
NIM. E0013193

MOTTO

“La Tahzan, Innallaha Ma’ana” – **At Taubah Ayat 40**

“Whatever you are, be a good one” – **Abraham Lincoln**

“Tidak ada kesuksesan yang didapat dengan mudah” – **Gama Wijaya**

PERSEMBAHAN

**Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Penulis mempersembahkan
karya ini kepada:**

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rizki-Nya

Sugiyarto, ayahanda tercinta yang selalu mendukung dalam setiap langkah yang
dilalui oleh penulis

Wahyu Astuti, ibu yang senantiasa mendoakan dan meberikan kasih sayang penuh
kepada penulis

Wisnu Wijaya, Novrida Mulya Rahma saudara penulis yang selalu memberikan
semangat dan motivasi tanpa henti serta sebagai tempatku belajar tentang
kehidupan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala petunjuk, rahmat dan rejeki yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini berjudul “ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PEMBERESAN HARTA/BOEDEL PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”

Kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan tugas Hakim Pengawas adalah sebagai pengawas dan pendamping Kurator dalam membereskan Harta Pailit. Bagian yang terpenting dari tugas Hakim Pengawas adalah pengawasan atas pemberesan Harta Pailit. Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GGL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 menyebutkan bahwa tindakan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta Pailit sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena telah mengamankan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) ke dalam Harta Pailit. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Hakim Pengawas sebagai pengawas dan pendamping Kurator dalam mengurus dan membereskan Harta Pailit seharusnya lebih teliti mengawasi tindakan Kurator yang disini Kurator dalam melakukan pemberesan sudah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan kajian mengenai kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta Pailit dan Kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi tindakan Kurator terhadap pemberesan Harta Pailit.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas perhatian yang besar selama penulisan hukum ini, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Dr. Soehartono S.H.,M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta
3. Harjono S.H., M.H Pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
4. Maria Madalina, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat yang sangat berarti dalam proses belajar mengajar penulis selama menempuh kuliah;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu dalam proses menuju penyusunan penulisan hukum ini;
6. Keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakanku yaitu Bapak, Ibu, Mas Wisnu, Mbak Novrida yang membantu penulis dalam berproses dan mengajarkan banyak hal dalam hidup;
7. Sahabat-sahabatku Angga, Lia, Pony, Ratih, Maulina, Hana, Hagni, Reza Memet, Rizki Fauzi, Tika, Angga Darexman, Ayu Kusuma, Bharata, Marthin yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
8. Sahabat Magang DPRD Karanganyar, yaitu Dimas, Aan, Dika, Luqman, Yuris yang telah memberikan banyak pengalaman baru di hidup saya;
9. Sahabat Bermain Futsal yaitu Oyak, Rio, Broma, Eindi, Tunjung, Alfian, Habijah, Pak Qumar, Oky, Babas, Faiz yang selalu mengajak penulis untuk bermain futsal dikala penulis mengalami kebuntuan saat proses penulisan skripsi;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 11 April 2017

Penulis

Gama Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	13

1. Tinjauan Tentang Pengadilan Niaga	13
2. Tinjauan Tentang Kepailitan	14
3. Tinjauan Tentang Kurator	23
4. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan	28
5. Tinjauan Tentang Lelang	33
6. Tinjauan Tentang Sita Jaminan	34
7. Tinjauan Tentang Non Eksekutabel	35
B. Kerangka Pemikiran	37
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Kasus Posisi	40
2. Identitas Para Pihak	41
3. Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	41
4. Memori Kasasi	42
5. Pertimbangan Hakim	50
6. Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung	51
B. Hasil Pembahasan	
1. Tanggung Jawab Kurator dalam Hal Terjadi Kesalahan atau Kekeliruan Melakukan Pemberesan Harta Pailit.....	51
2. Kewenangan Hakim Pengawas dalam Mengawasi Tindakan Kurator terhadap Pemberesan Harta Pailit	58
IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN PUTUSAN	

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta/Bodel Pailit dan kewenangan Hakim Pengawas mengawasi tindakan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta/Boedel Pailit.

Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amarnya menolak semua gugatan Penggugat dalam pemberesan Harta Pailit dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan studi pustaka yang terkait baik dari media cetak maupun media internet. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilaksanakan secara deduksi silogisme.

Kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta Pailit, Kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, Kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kurator dalam melakukan pemberesan Harta Pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitor.

Setiap perbuatan Kurator yang merugikan terhadap Harta Pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka Kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU antara lain Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap Harta Pailit ini berarti Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan Kurator yang merugikan Harta Pailit, maka harta pribadi Kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, setiap 3 bulan, Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Laporan ini bersifat untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).

Kata Kunci: Pailit, Kurator, Hakim Pengawas.

ABSTRACT

The aims of this research is to determine the responsibility of the Curator in case of errors / mistakes when doing Bankrupt Assets /Boedel settlement and authority of Supervisory Judge in overseeing the actions of Curator when doing Bankrupt Assets/Boedel settlement.

The verdict of Decision number 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst reject all the plaintiff in bankrupt assets settlement and has been confirmed by the Supreme Court Decision No. 769 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2016. This legal research using normative research in descriptive. The approach that used in this research is case approach. Sources of legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials that used in this reasearch are technical literature by collecting the relevant literature both from print and internet media. Analysis of legal materials in this legal research carried syllogism deduction.

Curator responsibility in case of any errors / mistakes when doing Bankrupt Assets settlement, curator has a fairy heavy task, which maintains and settlement the bankrupt assets. Therefore, the curator also has a fairly heavy responsibility for the bankrupt assets management and settlement which he did. All legal actions that have been carried out by the curator in performing the maintenance and settlement bankrupt assets can not be restored to its original state and be binding on all parties. In Article 17 clause (2) of the Bankrupt and PKPU Law explicitly stated that the decision of the declaration of bankrupt was canceled as a result of an appeal or reconsideration, the works which have been done by the curator before or on the date when Curator receive notice of the decision of the cancellation remain valid and binding debtors.

Any harm act of the Curator against the bankrupt assets or in the sense of harming the interests of creditors, either intentionally or unintentionally by the Curator then the Curator must be accountable for his actions. It is expressly stated in Article 72 of Bankrupt and PKPA Law, Curator responsible for the error / negligence in performing the duties of management and/or settlement which caused losses to the bankrupt assets, it means Curator in performing the maintenance and settlement can not act arbitrarily, because if there are Curator actions that harm the bankrupt assets, therefore personal assets of the Curator be held liable for such actions. As a form of Curator accountability, every three months, the curator must submit reports to the supervisory judge regarding the state of the bankruptcy estate and the execution of their duties (Article 74 clause (1) of the Bankrupt and PKPU Law). This report is for public and visible to everyone for free (Article 74 clause (2) of the Bankruptcy and PKPU Law).

Keywords: bankruptcy, the curator, the supervisor of the judge.